

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI
KEUANGAN DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN PADA
KANTOR OTORITAS PELABUHAN
UTAMA MAKASSAR**

HARMIATI TAHI

105730432713



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI
KEUANGAN DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN PADA
KANTOR OTORITAS PELABUHAN
UTAMA MAKASSAR**

**HARMIATI TAHI
1057 3043 2713**

**Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada
Jurusan Akuntansi**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Keuangan dalam Penggunaan Anggaran pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Nama Mahasiswa : HARMIATI TAHI

NIM : 10573 04327 13

Jurusan : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 03 Juli 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Drs. Asdi, M.M.
NIDN. 0026126103

Pembimbing II

Andi Arman, S.E., M.Si. Ak. CA.
NIDN. 0919017901

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ismail Rasulong, SE., MM.
NBM. 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si. AK.CA.
NBM. 107 3428


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **HARMIATI TAHI**, NIM. **10573 04327 13** ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: /Tahun 1439 H/2018 M dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Syawal 1439 M
03 Juli 2018 H

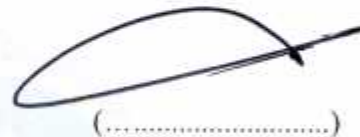
Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M.
(Rektor Unismuh Makassar)



(.....)

2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E., M.M.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)



(.....)

3. Sekretaris **Dr** Agussalim H.R., S.E., M.M.
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)



(.....)

4. Penguji: : 1. Dr. Muryani Aرسال, S.E., M.M. Ak. CA.



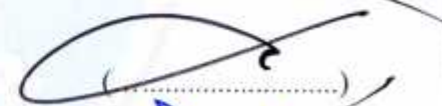
(.....)

2. Abd. Salam HB., S.E., M.Si. Ak. CA.



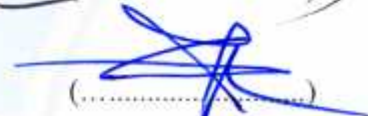
(.....)

3. Ismail Rasulong, SE., M.M.



(.....)

4. Samsul Rizal S.E., M.M.



(.....)

MOTTO

*“Lakukan yang terbaik,
bersikaplah yang baik maka
kau akan menjadi orang yang terbaik”*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih kepada kedua Orang tua ku Ibunda Pati dan Ayahanda ku Tahi, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan Ananda, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari lisanmu.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARMIATI TAHI
Stambuk : 105730432713
Jurusan : Akuntansi
Dengan Judul : “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Keuangan Dalam Penggunaan Anggaran Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar .

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar,03 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan

HARMIATI TAHI

Diketahui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs, Asdi, MM

Andi Arman,SE,M.Si.Ak.CA

ABSTRAK

HARMIATI TAHI, 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Keuangan Dalam Penggunaan Anggaran Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Dibimbing oleh Bapak Asdi dan Bapak Andi Arman, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan anggaran pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, dengan menjangking 2 orang pegawai sebagai informan kunci sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan variabel penelitian secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber daya manusia Akuntansi Pegawai sub bagian keuangan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah memiliki dasar tentang akuntansi atau keuangan untuk menyusun laporan keuangan, kemudian Teknologi Informasi keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar khususnya sub bagian keuangan telah menggunakan aplikasi RKA-KL sejak tahun 2009, selanjutnya Sistem Pengendalian Intern pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sejauh ini pengambilan keputusan atau wewenang langsung dari pimpinan, lalu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam hal ini yang menangani aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah mengikuti diklat atau bimtek, sedangkan untuk Kualitas informasi keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah disajikan secara terintegrasi dan tepat waktu.

Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintahan.

ABSTRACT

HARMIATI TAHI, 2017. Indonesia Factors Affecting the Quality of Financial Information in the Use of Budget at the Office of Port Authority of Makassar, Guided by Mr. Asdi and Mr. Andi Arman, Accounting Department Faculty of Economics and Business Muhammadiyah University of Makassar.

The purpose of this research is to know whether human resources, information technology, internal control system, and government accounting standard can influence the quality of financial information and budget usage at Makassar Main Port Authority Office by capturing 2 employees as key informant while technique documentation, observation, and interviews.

The method used in this research is descriptive qualitative research method that describes the qualitative research variables.

The results showed that Human Resources Accounting Employee sub-section finance at the Office Pelabuhan Utama Makassar Authority has a basis on accounting or finance to prepare financial statements, the Financial Information Technology at the Main Port Authority Makassar Office, especially the financial sub-section has been using RKA-KL application since 2009, then the Internal Control System at the Main Port Authority Makassar Authority so far decision-making or direct authority from the leadership, then Government Accounting Standards (GAS) in this case that handles SAIBA application at the Main Port Authority Makassar Office has followed the training or bimtek, while for the quality of financial information at the Main Port Authority Makassar Office has been presented in an integrated and timely manner.

Keywords: Human Resources, Information Technology, Internal Control System, Governmental Accounting Standards.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan Rahmat dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir belajar dan syarat guna memperoleh derajat sarjana S-1 pada program Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Keuangan Dalam Penggunaan Anggaran Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar”.

Banyak hikmah dan pengalaman berharga berharga yang dapat menjadi pelajaran bagi penulis dan menyelesaikan skripsi ini. Namun tidak sedikit pula hambatan dan kesulitan yang penulis alami. Berkat ketabahan, kesabaran, keiklasan, kerjakeras, ketekunan serta kemauan besar yang disertai do'a dan bantuan serta motivasi dari baerbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah makassar dan seluruh staf kariawan.

3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh staf dosen.
4. Bapak Drs. Asdi, MM., selaku pembimbing I dan Bapak Andi Arman,SE,M.Si.Ak.CA selaku pembimbing II yang dengan setia memberikan arahan masukan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Terima kasih tak terhingga kepada kepala pimpinan Bapak Ir. Rahmatullah, M.Si dan staf karyawan dinas perhubungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
6. Terkhusus kepada kak Pipit, kak Andre, kak Eko, dan seluruh pegawai sub bagian keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang telah membantu dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
7. Untuk keluarga besar akuntansi 7-13 dan teman sejawat saudara seperjuanganku Mumu, SE., Ibnati, SE., Tutun, SE., Ria, SE., yang selalu memberikan semangat dan setia bersama dalam menyelesaikan studi ini.
8. Kakakku Salbia yang selalu menyemangati ku dan mendukung ku dalam setiap langkah ku untuk menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada orang tua ku tercinta ayahanda Tahi dan Ibunda Pati yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta keiklasan dalam mendidik dan mendo'akan ananda sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas jasa atas segala bantuan dan dorongan yang telah penulis dapatkan dari pihak-pihak tersebut diatas.

Penulis menyadari bahwa sebagai hamba Allah SWT, tidak akan terlepas dari segala kekhilafan serta segala keterbatasan, olehnya itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermamfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Makassar, 03 juli 2018

Penyusun

Harmiati Tahi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Akuntansi Sektor Publik	8
1. Pengertian Sistem Akuntansi Sektor Publik	8
2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik	9
B. Sistem Informasi Keuangan	10
1. Pengertian Sistem Informasi Keuangan	10
2. Tujuan Sistem Informasi Keuangan	11
3. Komponen Sistem Informasi Keuangan	11
C. Kualitas Informasi Keuangan	14
1. Pengertian Kualitas Informasi	14
2. Kriteria Kualitas Informasi Keuangan	15
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan	18
1. Sumber Daya Manusia (SDM)	18
2. Teknologi Informasi (TI)	19
3. Sistem Pengendalian Intern (SPI)	21
4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	23
E. Penganggaran Pemerintah	24
1. Pengertian APBN/APBD	24
2. Dokumen Penyusunan Anggaran Pemerintah Dalam Tahap-Tahap Penyusunan APBN/APBD	26
F. Laporan Realisasi Anggaran	27
G. Penelitian Terdahulu	28
H. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	37
B. Defenisi Operasional Variabel	37

C. Metode Pengumpulan Data.....	38
D. Jenis Dan Sumber Data.....	39
E. Informan Penelitian.....	40
F. Metode Analisis Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	42
A. Sejarah Singkat Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar	42
B. Visi Dan Misi Organisasi	44
C. Struktur Organisasi	45
D. Kegiatan Usaha	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Hasil penelitian	52
1. Data Informan	52
2. Deskripsi Hasil Penelitian	53
B. Pembahasan	57
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
Riwayat Hidup	81
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Table	Keterangan	Halaman
Table 1.	Penelitian Terdahulu	31
Table 2.	Daftar Kunjungan Kapal (<i>Ships Call</i>) dan <i>Gross Ton</i> (GT)	47
Table 3.	Data Bongkar Muat Dipelabuhan Makassar	49
Table 4.	Data Arus Penumpang Dipelabuhan Makassar.....	51
Table 5.	Data Informan Penelitian	52
Table 6.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	68

Daftar Gambar

Gambar	Keterangan	Halaman
Gambar 1.	Kerangka Pikir	36
Gambar 2.	Struktur Organisasi	45
Gambar 3.	Tampilan Awal Pada Aplikasi SAS	71
Gambar 4.	Tampilan Menu Referensi.....	72
Gambar 5.	Tampilan Menu Pada Utility.....	73
Gambar 6.	Tampilan awal Aplikasi (RKA-KL).....	73
Gambar 7.	Tampilan Pada Menu RKA-KL 2017	74
Gambar 8.	Tampilan Awal Pada Aplikasi SAIBA	74
Gambar 9.	Tampilan Daftar Surat Perintah Membayar (SPM)	75

Daftar Lampiran

Lampiran	Keterangan	Halaman
Lampiran 1.	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	82
Lampiran 2.	Checklist Observasi	85
Lampiran 3.	Pedoman Wawancara	89
Lampiran 4.	Checklist Hasil Observasi	91
Lampiran 5.	Transkrip Wawancara.....	95
Lampiran 6.	Foto Dokumentasi	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pengelolaan keuangan, akuntansi keuangan telah mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan zaman. Pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah baik pemerintah pusat termasuk didalamnya lingkungan kementerian perhubungan, maupun pemerintah daerah, harus mengikuti perkembangan akuntansi karena pengguna informasi dalam hal ini masyarakat menuntut agar dilakukannya akuntabilitas dan transparansi.

Pemerintah berkewajiban untuk mempublikasikan informasi berdasarkan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, informasi yang dipublikasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat dipahami, dipercaya, dan digunakan oleh para pemakai informasi tersebut.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh badan pemeriksaan keuangan (BPK). Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal.

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sebagai salah satu unit pelayanan kepelabuhanan dalam lingkup kementerian perhubungan juga dituntut harus mengikuti aturan dalam bidang keuangan yang ditetapkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal perbendaharaan kementerian keuangan.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mewajibkan menyelenggarakan akuntansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 tahun 2016 juga wajib

menyelenggarakan akuntansi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Unit Pemerintah.

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut. Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) atau kualitas (*qualities*) informasi.

Laporan keuangan merupakan media bagi suatu entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada publik. Dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang diterapkan saat ini harus sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu memenuhi karakteristik; Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami. Oleh karena itu dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah

kompetensi aparatur pemerintah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dalam hal ini pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur.

Dalam mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah harus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Aspek lain yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Hal lain yang berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan diterapkannya sistem pengendalian internal dalam organisasi pemerintah, diharapkan secara menyeluruh aset pemerintah dapat dilindungi dari kerusakan fisik atau kecurangan data dan terhindarnya kesalahan pencatatan baik di sengaja maupun tidak disengaja.

Dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal akan selalu berhubungan dengan manusia. Faktor manusia sebagai karyawan/pegawai sangat vital untuk mendukung tercapainya tujuan sistem pengendalian internal sumber daya manusia ternyata merupakan faktor yang tidak dapat dilepaskan dengan pelaksanaan suatu sistem pengendalian internal.

Standar akuntansi pemerintahan mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pusat/daerah. Maka dari itu SAP merupakan persyaratan sekaligus pedoman yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah.

Dari beberapa uraian yang dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Keuangan Dalam Penggunaan Anggaran Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang diangkat penulis adalah : apakah sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan anggaran pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan anggaran pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi bagi pimpinan instansi khususnya sub bagian keuangan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yang akhirnya berdampak positif dan dapat menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.
2. Sebagai bahan informasi bagi pegawai sub bagian keuangan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan untuk menambah pengetahuan mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan anggaran pada kantor otoritas pelabuhan utama Makassar.

3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya dan dapat dijadikan sebagai rujukan atau acuan yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi Sektor Publik

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Adapun pengertian akuntansi sektor publik menurut ahli sebagai berikut :

Bastian (2010 : 16) dalam Kurniawan (2016 : 8) menyatakan bahwa :

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya. Pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta sektor-sektor swasta.

Sedangkan Tanjung (2009 : 35) dalam Kurniawan (2016 : 9) mengemukakan bahwa :

Akuntansi pemerintahan adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya yang bersifat keuangan dan termasuk pelaporan dan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik adalah serangkaian yang terdiri dari proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, yang memberikan informasi yang bersifat *financial* terhadap entitas pelaporan.

Akuntansi pemerintahan bisa dikatakan juga sebagai Akuntansi Sektor Publik. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sehingga suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Bidang yang dikelola pemerintah umumnya berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa yang vital bagi masyarakat. Namun, selain layanan umum, pemerintah yang melaksanakan aktivitas penyediaan barang atau jasa seperti yang dilakukan sektor swasta. Disamping perbedaan bidang yang dikelola, dalam beberapa hal sektor publik dan sektor swasta memiliki persamaan, yaitu :

- a. Merupakan bagian integral sistem ekonomi yang menggunakan sumber-sumber yang sama untuk mencapai tujuan
- b. Sama-sama memperoleh dan menggunakan sumber-sumber yang langka untuk menghasilkan barang atau jasa
- c. Melakukan analisis biaya, pengendalian evaluasi aktivitas untuk menjamin sumber keuangan dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien
- d. Dalam beberapa hal, dapat pula menghasilkan produk yang sama.

B. Sistem Informasi Keuangan

1. Pengertian Sistem Informasi Keuangan

Berikut ini pengertian sistem informasi yang dikemukakan oleh Jogiyanto (2005 : 11) dalam Wendri Tenardi dkk (2009 : 2) mendefinisikan :

Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Sedangkan Budi Sutedjo (2002 : 11) dalam Wendri Tenardi dkk (2009 : 2) mendefinisikan sistem informasi sebagai berikut :

Sistem informasi didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan data atau laporan-laporan yang akan diolah atau diproses untuk digunakan pihak luar tertentu.

Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari SIM yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Secara umum sistem informasi keuangan memiliki sistem pemasukan yang terdiri dari subsistem data *processing* didukung oleh internal audit subsistem yang menyediakan data dan informasi internal. Untuk perusahaan besar biasanya memiliki staf internal auditors yang bertanggung jawab terhadap perawatan

Integritas sistem keuangan perusahaan. Orang yang ahli dalam bidang ini disebut EDP auditors. Sebagaimana subsistem lainnya, sistem ini juga dilengkapi *financial intelligence subsystem*, yang mengumpulkan informasi dari lingkungan.

2. Tujuan Sistem Informasi Keuangan

Sistem Informasi Keuangan dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan yang mampu menghubungkan kantor satker ke jenjang di atasnya.
- b. Mendukung efisiensi, efektifitas dan kelancaran penyusunan laporan keuangan
- c. Sebagai upaya mencapai peningkatan opini laporan keuangan.

3. Komponen Sistem Informasi Keuangan

Komponen sistem informasi keuangan terdiri dari komponen *input* dan *output* sebagai berikut :

a. Komponen *input*

Komponen *input* sistem informasi keuangan (*financial*) diantaranya adalah:

- 1) Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen digunakan oleh pihak manajemen dalam menjalankan

bisnis perusahaan. Sehingga sistem informasi akuntansi dalam hal ini juga sebagai sumber informasi yang berguna dalam mencapai tujuan perusahaan yang terangkum dalam sistem informasi manajemen.

- 2) Komponen Audit Internal, merupakan badan yang melaksanakan aktivitas internal auditing, berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks. Subsistem audit internal internaldirancang secara khusus untuk melakukan studi khusus mengenai operasi perusahaan.
- 3) Komponen Intelijen Keuangan, komponen ini mengumpulkan data dari masyarakat keuangan yaitu bank, agen pemerintah, pasar pengaman dan sebagainya. Komponen ini memonitor denyut nadi ekonomi nasional dan memberikan informasi kepada eksekutif perusahaan dan analisis keuangan mengenai trend yang dapat mempengaruhi perusahaan. Berperan digunakan mengidentifikasi sumber-sumber terbaik modal tambahan dan investasi terbaik.

b. Komponen *Output*

Komponen *output* sistem informasi keuangan (financial) diantaranya adalah:

- 1) Sistem Peramalan, yaitu kegiatan matematis tertua dalam bisnis, dimana pada komponen peramalan memproyeksikan aktivitas perusahaan untuk jangka waktu sepuluh tahun atau lebih. Aktivitas tahun yang akan datang terutama dipengaruhi oleh permintaan pasar dan hambatan internal seperti kapasitas produksi, dan keuangan yang ada.
- 2) Komponen Manajemen Dana, bertugas untuk mengelola arus keuangan, dan menjaganya agar tetap seimbang dan positif. Subsistem manajemen dana menggunakan proyeksi aktivitas perusahaan untuk menentukan arus uang keluar masuk perusahaan. Manajer dapat mensimulasi beberapa strategi yang dirancang untuk mencapai keseimbangan yang terbaik mengenai arus masuk dan keluar selama jangka waktu yang akan datang, misalnya waktu yang akan datang. Arus yang seimbang mengurangi kebutuhan yang tidak penting mengenai modal operasi pinjaman yang tidak diperlukan dan meningkatkan pendapatan dari dana yang telah diinvestasikan.

- 3) **Komponen Pengendalian**, yaitu kegiatan yang memudahkan manajer untuk menggunakan secara efektif, menunjukkan bagaimana uang tersebut digunakan. Laporan itu biasanya membandingkan penampilan keuangan yang sebenarnya dengan anggaran. Komponen pengendalian memungkinkan manajer untuk mengontrol penggunaan anggaran.

C. Kualitas Informasi Keuangan

1. Pengertian Kualitas Informasi Keuangan

Adapun pengertian kualitas informasi menurut beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Nugroho Widjajanto (2004 : 24) dalam Kumalase dkk (2014 : 117) mendefenisikan kualitas informasi sebagai berikut :

Kualitas informasi dikatakan berkualitas bila informasi tersebut mengandung ketidakpastian paling rendah, akan tetapi informasi tidak dapat terbebas sama sekali dari unsur ketidakpastian. Oleh karena itu diperlukan perbandingan antara data memperoleh informasi dengan manfaat yang diperoleh dengan adanya informasi itu sendiri.

Dengan kata lain informasi baru layak disiapkan jika, biayanya lebih rendah daripada tambahan pendapatan nyata yang dihasilkan dari adanya informasi itu. Untuk menopang terbentuknya kualitas informasi yang baik ada beberapa atribut yang perlu diperhitungkan menurut Nugroho Widjajanto (2004 : 24) Kumalase dkk (2014 : 117) yaitu :

- a. Kecermatan (*Accuracy*), kecermatan dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara informasi yang benar terhadap total informasi yang dihasilkan dalam suatu periode. Semakin kritis sifat informasi akan semakin tinggi kecermatan yang diperlukan.
- b. Penyajian yang tepat waktu (*timeliness*) informasi yang lambat diterima nilai kegunaanya akan lebih rendah, karena keputusan bisnis yang cepat dianggap lebih baik daripada keputusan yang lambat.

Sedangkan Sulistyoningsih (2006 : 1) dalam Kumalase dkk (2014 : 117)

kualitas menyatakan bahwa:

“informasi dikatakan berkualitas apabila telah dapat mengungkapkan informasi yang materiil secara lengkap dan akurat mencakup dimensi penting yang relevan dari kejadian esensial”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi tersebut mengandung ketidakpastian paling rendah, dapat mengungkapkan informasi yang materiil secara lengkap dan akurat

2. Kriteria Kualitas Informasi Keuangan

Kriteria Kualitas Informasi Keuangan untuk mendapatkan informasi akuntansi berupa laporan keuangan, diperlukan standar atau kriteria yang menjadi acuan pokok dalam membuat laporan keuangan yang dinilai berkualitas. Di Indonesia standar laporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan adalah himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan

laporan keuangan, khususnya yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan, seperti kreditor.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, tujuan akuntansi dan laporan keuangan pada dasarnya untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha yang akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan ekonomi. Manfaat informasi keuangan terpenuhi jika memiliki kriteria atau standar. Berikut ini beberapa kriteria kualitas informasi keuangan blogspot.com (2014) :

a. Relevan

Relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Jika informasi tidak relevan untuk keperluan para pengambilan keputusan, tidak ada gunanya walaupun kualitas lainnya terpenuhi. Oleh karena itu, perlu dipilih metode pelaporan akuntansi keuangan yang tepat.

b. Dapat diuji

Pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbangan dan pendapat yang subjektif. Untuk meningkatkan manfaatnya, informasi keuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.

c. Dapat dimengerti

Informasi yang disajikan harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan pengertian para pemakai.

d. Netral

Laporan keuangan atau informasi keuangan diarahkan pada kepentingan umum dan tidak bergantung pada kebutuhan pihak tertentu.

e. Tepat waktu

Informasi hendaknya diberikan sedini mungkin agar menjadi sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

f. Dapat dibandingkan

Informasi laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya dari perusahaan yang sama atau dengan laporan keuangan perusahaan yang sejenis pada periode yang sama.

g. Lengkap

Informasi keuangan lengkap jika memenuhi enam tujuan kualitatif di atas dan dapat memenuhi standar pengungkapan laporan keuangan.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Kualitas Informasi Keuangan

1. Sumber daya manusia (SDM)

Pengertian SDM menurut Matindas (2002 : 89) dalam Kurniawan (2016 : 19) bahwa :

“Sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia yang ada dalam suatu organisasi dan bukan sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada”.

Sebagian kesatuan sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi.

Berbicara tentang sumber daya manusia, hidup, arti, dan peranan keberadaannya selalu aktual. Sebab sampai sekarang ini manusia tetap menjadi sentral pembahasan dalam berbagai masalah. Peristiwa macam apapun yang ada di dunia ini dan masalah apapun yang harus dipecahkan di bumi kita ini pada hakikatnya berhubungan dengan manusia. Misalnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat mempermudah hidup manusia dan sekaligus mempermudah hidup manusia.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung oleh latar

belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, maka diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu memahami dan menerapkan akuntansi dengan baik.

2. Teknologi informasi (TI)

Menurut Wilkinson dkk, (2000) dalam Irfan Ikhwal Haza, (2008 : 5) teknologi Informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi informasi meliputi computer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software, database*), jaringan (*internet, electronic commerce*), dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer jga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (wahana komputer, 2003). Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, computer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika computer dan kompone-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam

suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi.

Pemanfaatan TI dalam akuntansi menurut Jurnal dan Supomo (2002) dalam Irfan Ikhwal Haza, (2008 : 5) teknologi informasi bermanfaat dalam pelaksanaan tugas-tugas akuntansi tetapi beberapa hal berikut ini pula menjadi perhatian:

- a. Bagian akuntansi/keuangan memiliki computer yang cukup untuk melaksanakan tugas
- b. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja
- c. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan
- d. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi
- e. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi
- g. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur
- h. Peralatan yang using atau rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya.

3. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Menurut Mahmudi (2010 : 20) dalam Madjham dkk (2013 : 4)

pengertian Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai berikut :

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dan mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Adapun tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melindungi asset (termasuk data) Negara
- b. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
- c. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal
- d. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP).
- e. Untuk Efisiensi dan Efektivitas Operasi

- f. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur sistem Pengendalian Intern dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan itu, Mahmud (2010 : 20-22) dalam Madjham dkk (2013 : 5) menyebutkan komponen sistem pengendalian intern pemerintah, terdiri atas lima komponen yaitu:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Resiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi Dan Komunikasi
- e. Pemantauan

4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Setiap entitas pelaporan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

- a. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah
- b. PSAP Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan
- c. PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran
- d. PSAP Nomor 03 Tentang Laporan Arus Kas

Dengan adanya SAP, maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan). Laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain pemerintah,

DPR/DPRD, investor, kreditor dan masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

E. Penganggaran Pemerintah

Berikut ini pemaparan mengenai APBN/APBD, Dokumen Penyusunan Anggaran Pemerintah Dalam Tahap-Tahap Penyusunan APBN/APBD, Dokumen Penyusunan Anggaran Pemerintah Dalam Tahap-Tahap Penyusunan APBN/APBD sebagai berikut (Mahsun : 79-82) :

1. Pengertian APBN/APBD

Adapun penjelasan mengenai APBN dan APBD sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah daftar yang memuat rincian penerimaan Negara dan pengeluaran belanja Negara selama satu tahun yang ditetapkan dengan undang-undang untuk masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (disebut tahun *fiscal*).

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdiri atas :

- 1) Anggaran pendapatan
- 2) Anggaran belanja
- 3) Pembiayaan

Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja Negara ini dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Penyusunan rancangan APBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Negara.

b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) untuk masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas :

- 1) Anggaran pendapatan
- 2) Anggaran belanja

3) Pembiayaan

Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dan perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pemerintah daerah. Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Penyusunan rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

2. Dokumen Penyusunan Anggaran Pemerintah Dalam Tahap-Tahap Penyusunan APBN/APBD

a. Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Rencana Kerja Anggaran merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu satuan kerja pemerintah danb sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah (Renja) yang bersangkutan dalam

satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

- b. RAPBN/RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional/ Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional)

Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional/ Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional merupakan rencana anggaran yang harus dibahas oleh Tim anggaran dan Legislatif sebelum diretifikasi/disahkan menjadi APBN/APBD.

- c. APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional/ Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah)

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional/ Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah merupakan RAPBN/RAPBD yang telah disetujui oleh legislatif memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah selama satu tahun.

F. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan

PSAP No. 02 mengatur persyaratan-persyaratan untuk penyajian laporan realisasi anggaran dan pengungkapan informasi terkait (KSAP, 2012).

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi (KSAP, 2012) :

1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat;
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya membahas tentang kualitas informasi keuangan dalam penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Putu Upabayu Rama Mahaputra, dkk (2014)

Dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji variabel kualitas informasi laporan keuangan.

Perbedaannya, Penelitian Putu Upabayu Rama Mahaputra, Dkk (2014) Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar sedangkan penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaa anggaran Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

2. Tantriani Sukmaningrum (2012)

Dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang).

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji kualitas informasi laporan keuangan.

Perbedaannya, penelitian Tantriani Sukmaningrum (2012) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah sedangkan penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan anggaran

3. Taufik Saleh, dkk (2012)

Dengan judul pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kualitas informasi akuntansi dalam upaya meningkatkan kepuasan pengguna software akuntansi pada Pemerintah Aceh.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji kualitas informasi.

Perbedaannya, penelitian Taufik Saleh, dkk (2012) menganalisis pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kualitas informasi akuntansi dalam upaya meningkatkan kepuasan pengguna software akuntansi pada Pemerintah Aceh sedangkan penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan anggaran di Kementerian perhubungan

4. Lalu Ariz Ramdani (2008)

Dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi (Studi pada Satuan Kerja Di Wilayah Kerja KPPN Malang Tahun 2008)

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji kualitas informasi keuangan.

Perbedaannya, penelitian Lalu Ariz Ramdani (2008) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi sedangkan penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan anggaran.

Adapun penjelasan penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1	Putu Upabayu Rama Mahaputra, dkk (2014)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar	Variabel x : Kapabilitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintahan, Sedangkan Variabel Y : Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan	Metode Pengumpulan Data Menggunakan Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian Menunjukkan Kapabilitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Pada Kualitas Informasi Akuntansi Pada Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.

2	Tantriani Sukmaningrum (2012)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang)	Variabel x : Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Faktor Eksternal Sedangkan Variabel y : Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Metode Pengumpulan Data Menggunakan Kuesioner, Sedangkan Metode Analisis Data Yang Digunakan Adalah Teknik Analisis Kuantitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Dan Faktor Eksternal Memoderisasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan, Faktor Eksternal Memoderisasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.
---	-------------------------------------	--	--	--	---

3	Taufik Saleh, dkk (2012)	Pengaruh Kualitas Sistem informasi Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Penggunaan Software Akuntansi Pada Pemerintah Aceh	Variabel x : Kulaitas Sistem Informasi, Sedangkan Variabel y : Kualitas Informasi Akuntansi dan Kepuasan Penggunaan <i>Software</i>	Metode Pengumpulan Data	Hasil Penelitian Menunjukkan Kualitas Sistem Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Dan Kualitas Sistem Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kepuasan Penggunaan <i>Software</i> Akuntansi
4	Lalu Ariz Ramdani (2008)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi Pada Satuan Kerja Di Wilayah Kerja KPPN Malang Tahun 2008)	Variabel x : Sumber Daya Manusia Sedangkan Variabel y : Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Metode Pengumpulan Data	Hasil Penelitian Menunjukkan Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Relevansi Informasi Sebagai Indikator Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satker

H. Kerangka Pikir

Pendirian Otoritas Pelabuhan (OP) ditegaskan dalam UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Peraturan Pemerintah No 61/2009 tentang Kepelabuhan. Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah dipelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

Dari beberapa pengertian akuntansi sektor publik dapat dikatakan yaitu serangkaian yang terdiri dari proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, yang memberikan informasi yang bersifat financial terhadap entitas pelaporan.

Sistem informasi keuangan adalah sebuah data yang telah dibuat dan juga diolah dengan metode tertentu untuk mengelola keuangan yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi.

Kualitas informasi keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan.

Sumber daya manusia berhubungan dengan pegawai yang memiliki kemampuan, skill yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pelatihan, serta memiliki pengalaman kerja dibidang keuangan dan Teknologi informasi mengolah data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan.

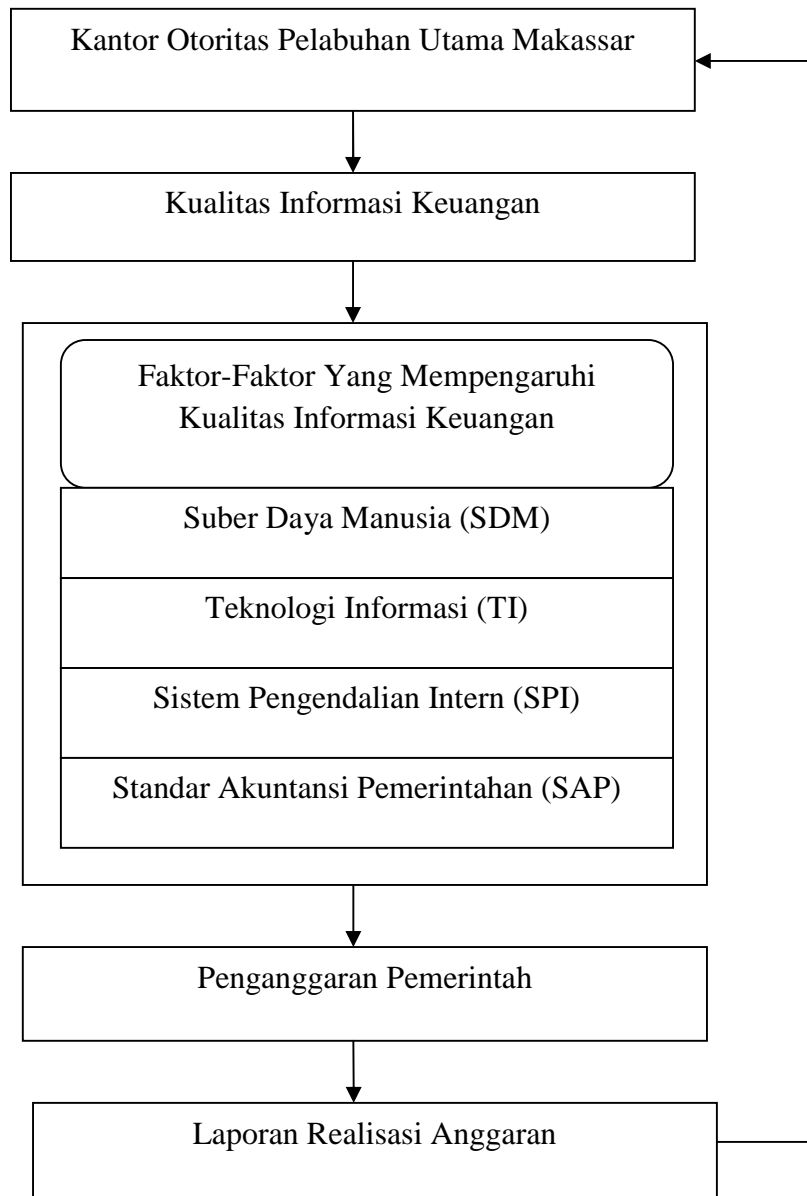
Selain sumber daya manusia dan teknologi informasi, sistem pengendalian intern juga mempengaruhi kualitas informasi keuangan. pada instansi pemerintahan, dibutuhkan pengawasan untuk mengontrol semua pegawai, baik mengenai organisasinya, sistem, maupun cara-cara untuk menjalankan aktivitasnya agar tidak jadi penyimpangan atau kesalahan melakukan aktivitasnya. Selanjutnya, hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan pemerintah yaitu standar akuntansi pemerintahan. untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Sehingga dengan adanya sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan, maka menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

Dibutuhkan informasi keuangan yang berkualitas agar pemerintah dapat memuat rincian penerimaan Negara dan pengeluaran belanja Negara.

Adapun kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 1.

Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Jln. Madura No. 1 Pelabuhan Makassar. Penelitian ini diperkirakan dalam jangka waktu kurang lebih tiga bulan, mulai bulan Maret s/d Juni 2017.

B. Defenisi Operasional Variabel

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dalam penggunaan Anggaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

1) Sumber daya manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah potensi atau kemampuan yang dimiliki setiap manusia atau pegawai pemerintahan dalam mengelola keuangan pemerintah melalui latar belakang pendidikan, mengikuti pelatihan, serta mempunyai pengalaman kerja dibidang keuangan.

2) Teknologi informasi (TI)

Teknologi informasi (TI) merupakan gambaran dari setiap teknologi yang membantu manusia dalam berkomunikasi, menyimpan, memanipulasi, menghasilkan dan menyebarkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan

teknologi informasi yang berguna untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan.

3) Sistem pengendalian intern (SPI)

Sistem pengendalian internal adalah serangkaian yang meliputi struktur organisasi maupun sistem atau cara-cara untuk menjaga aset pemerintah, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau fraud.

4) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut

1. Dokumentasi yaitu melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini berupa laporan keuangan mengenai penggunaan anggaran pada kantor otoritas pelabuhan utama Makassar.

2. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan laporan keuangan mengenai penggunaan anggaran pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar
3. Pengamatan yaitu pengumpulan data dengan mengamati sistem pengelolaan laporan keuangan mengenai penggunaan anggaran oleh para pegawai sub bagian keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Pengamatan ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperlukan dan sebagai informasi atas data penelitian.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang secara langsung dari informan atau pegawai sub bagian keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang digunakan dalam penelitian. Data tersebut berupa jawaban-jawaban dari pegawai bagian keuangan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis dengan cara melakukan wawancara
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh sudah merupakan data olahan dari proses pencatatan transaksi-transaksi dan dokumen seperti laporan keuangan mengenai penggunaan anggaran di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informan tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini informan yang digunakan peneliti ialah sejumlah 2 orang pegawai sub bagian keuangan yang bisa menjelaskan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Keuangan Dalam Penggunaan Anggaran Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

F. Metode Analisis Data

Untuk membahas masalah yang dikemukakan sebelumnya penulis akan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskriptifkan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan, kemudian diolah dan menyajikan data-data yang akan digunakan dalam suatu penelitian analisis ini berdasarkan data yang dinyatakan dalam bentuk uraian informasi laporan keuangan mengenai penggunaan anggaran dikembangkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan atau menguatkan suatu gambaran dalam hal ini mengenai sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dalam penggunaan anggaran pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Penelitian ini

menggunakan pedoman pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) dengan pegawai sub bagian keuangan (instrumen terlampir).

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah singkat Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Sejarah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar di mulai dari perubahan nama kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) menjadi kantor Kesyabandaran dan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makasaar. Kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) secara resmi berganti nama menjadi kantor kesyabandaran dan orotitas pelabuhan sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan KM No. 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, PM No. 35 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja otoritas pelabuhan utama.

Pada tanggal 5 oktober 2010 di Jakarta Departemen Perhubungan secara resmi melakukan perubahan nomenklatur pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla). Selain peubahan nomenklatur, Kementerian Perhubungan juga menetapkan peningkatan kelas pada empat kantor Otoritas Pelabuhan (OP) diantaranya: pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Makassar. Kantor kesyabandaran yang selama ini sudah ada di pelabuhan utama, menjadi kantor Otoritas Pelabuhan kelas utama dan kantor Kesyabandaran kelas utama.

Adapun tahap pengembangan periode 2013-2017 di Pelabuhan Utama Makassar sebagai berikut :

a. Pelabuhan Hatta

Meningkatkan kapasitas dan pelayanan fasilitas pelabuhan Hatta yang ada yakni berupa pembangunan perpanjangan dermaga *multi purpose* sepanjang 150m.

b. Makassar *New Port*

Pada periode pengembangan jangka pendek ini mulai dibangun Makassar *New Port* yakni berupa lahan reklamasi seluas 46 ha (disiapkan untuk dapat dibangun terminal petikemas di atasnya dengan kapasitas mencapai hingga 1.030.000 TEU's per tahun).

TEUS atau TEU (*twenty foot equivalent*) unit yang merupakan satuan terkecil dalam ukuran peti kemas.

c. Pelabuhan Soekarno

Pada periode ini di lokasi pelabuhan Soekarno akan dilakukan pengaturan kembali peruntukan lapangan dan dermaga untuk kapal Ro-Ro, general cargo, dan curah kering. Terminal penumpang pada periode ini masih tetap beroperasi di pangkalan Soekarno sambil menunggu kesiapan pengembangan pelabuhan Boddia sebagai terminal penumpang.

d. Pelabuhan Paotere

Pengembangan pada periode ini berupa pembangunan dermaga sepanjang 150m untuk kapal-kapal pelayaran rakyat dan juga sebagai tempat sandar untuk kapal-kapal nelayan.

B. Visi dan Misi Organisasi

1. Visi

“Terselenggaranya pelabuhan yang kondusif, efektif, efisiensi dan berdaya saing tinggi dalam menunjang perekonomian nasional di Era Globalisasi”

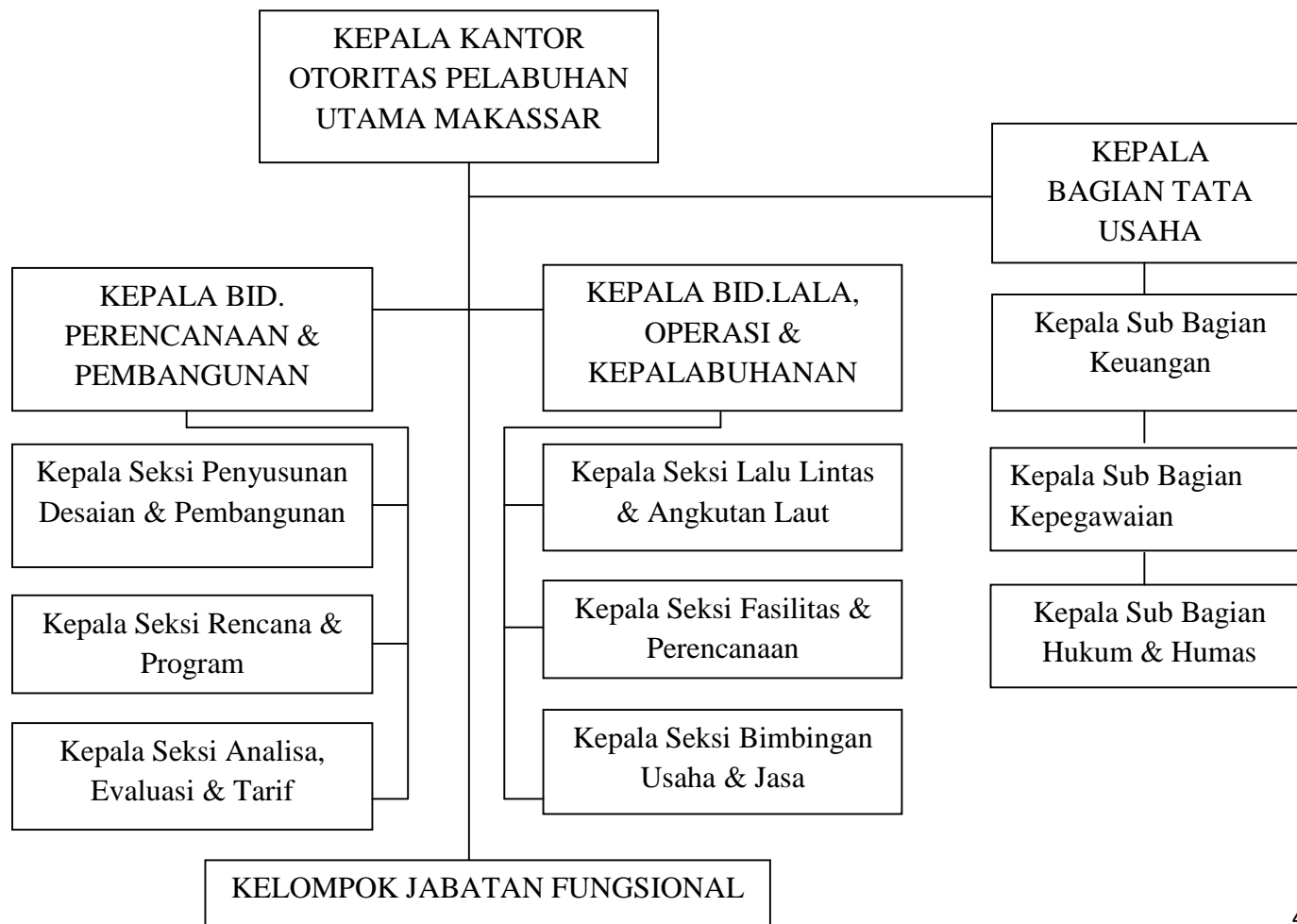
2. Misi

- a. Menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus barang serta kelestarian lingkungan pelabuhan;
- b. Mewujudkan Standar Kinerja Operasional Pelabuhan sesuai dengan kondisi fasilitas terminal;
- c. Menyediakan infrastruktur pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Mewujudkan Tata Guna Lahan Daratan dan Perairan sesuai Rencana Induk Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp).

C. Struktur Organisasi

Gambar 2.

Struktur Organisasi



D. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan pelabuhan Makassar yaitu pelayanan terhadap kapal, barang, dan penumpang. Pelabuhan memberikan pelayanan terhadap kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan baik dalam negeri maupun luar negeri, kegiatan bongkar muat barang, dan melayani penumpang yang naik/turun dari kapal. Pelayanan ini dilakukan mengingat pentingnya keamanan dan ketertiban yang tentunya dirasakan oleh penumpang/masyarakat dan pihak dari pelabuhan itu sendiri.

Berikut ini uraian kegiatan usaha yang dilakukan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, sebagai berikut :

- a. Data Kunjungan Kapal (*Ships Call*) dan *Gross Ton* (GT) di Pelabuhan Utama Makassar (Periode Januari s/d Desember Tahun 2016)

Tabel 2.

Data kunjungan Kapal (*Ships Call*) dan *Gross Ton* (GT)

NO.	BULAN	URAIAN JENIS ANGKUTAN LAUT											
		DALAM NEGERI		LUAR NEGERI		KHUSUS		PELAYARAN RAKYAT		PERINTIS		JUMLAH	
		SHIP CALL	GT	SHIP CALL	GT	SHIP CALL	GT	SHIP CALL	GT	SHIP CALL	GT	SHIP CALL	GT
1	JANUARI	304	2.050.016	13	155.535	50	230.212	71	7.645	5	3.185	443	2.446.593
2	FEBRUARI	301	1.953.025	10	10.856	65	237.482	65	9.170	8	6.778	449	2.217.311
3	MARET	177	2.012.357	21	304.999	50	72.223	88	12.473	9	49.873	345	2.451.925
4	APRIL	255	1.832.834	12	161.422	48	193.021	61	6.316	7	4.673	383	2.198.266
5	MEI	284	1.993.091	19	338.752	46	263.224	82	8.212	9	6.583	440	2.609.862
6	JUNI	303	1.943.052	22	476.192	44	216.717	83	8.127	10	7.567	462	2.651.655
7	JULI	254	1.861.427	16	268.521	54	276.207	68	6.393	9	6.608	401	2.419.156
8	AGUSTUS	306	2.156.046	15	214.824	56	285.102	82	7.485	7	3.790	466	2.667.247
9	SEPTEMBER	310	1.987.774	18	348.999	52	279.397	68	6.393	8	4.535	456	2.627.098
10	OKTOBER	342	2.091.961	19	263.759	51	247.226	60	5.509	10	8.303	482	2.616.758
11	NOVEMBER	318	2.079.007	15	238.501	50	260.302	66	7.079	4	3.408	453	2.588.297
12	DESEMBER	325	2.406.820	20	367.828	55	271.786	61	6.614	5	4.667	466	3.057.715
JUMLAH		3.479	24.367.410	200	3.150.188	621	2.832.899	855	91.416	91	109.970	5.246	30.551.883

Sumber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Kunjungan Kapal (*ships call*) adalah kapal yang datang di pelabuhan baik untuk berlabuh di perairan maupun bersandar di dermaga

Gross Ton (GT) adalah volume ruangan kapal dalam m kubik meliputi volume ruangan kapal kecuali tunnel (terowongan), lubang poros baling-baling, *chain locker* (tempat jangkar) dan alas ganda.

Pelayanan kapal dimulai dari kapal masuk ke perairan pelabuhan, berada di kolam pelabuhan, ketika akan bersandar di tambatan, sampai saat kapal meninggalkan pelabuhan.

b. Data Bongkar Muat di Pelabuhan Makassar (Periode Januari s/d Desember Tahun 2016)

Tabel 3.

Data Bongkar Muat Dipelabuhan Makassar

NO.	BULAN	URAIAN JENIS ANGKUTAN LAUT											
		DALAM NEGERI		LUAR NEGERI		KHUSUS		PELAYARAN RAKYAT		PERINTIS		JUMLAH	
		BONGKAR	MUAT	BONGKAR	MUAT	BONGKAR	MUAT	BONGKAR	MUAT	BONGKAR	MUAT	BONGKAR	MUAT
1	JANUARI	481.700	447.227	112.714	11.025	123.694	45.000	2.708	14.893	-	700	720.816	518.845
2	FEBRUARI	311.787	279.495	43.339	17.872	145.969	66.389	1.597	16.081	-	48	502.692	379.885
3	MARET	249.285	404.341	165.833	11.744	146.466	57.412	663	18.340	-	40	562.247	491.877
4	APRIL	394.326	340.499	25.320	19.815	85.900	55.417	1.070	8.490	-	200	506.616	424.421
5	MEI	628.840	316.936	54.151	20.245	148.078	70.085	694	11.285	-	200	831.763	418.751
6	JUNI	217.992	365.370	143.405	49.802	131.639	40.185	1.314	8.948	-	869	494.350	465.174
7	JULI	318.416	272.169	42.437	50.486	191.363	32.655	2.844	10.368	-	120	555.060	365.798
8	AGUSTUS	350.017	434.437	135.028	17.704	151.744	33.020	2.353	11.002	-	210	639.142	496.373
9	SEPTEMBER	287.920	419.969	129.692	31.250	156.107	50.981	2.844	10.368	-	134	576.563	512.702
10	OKTOBER	366.197	434.351	95.302	32.353	134.881	37.288	1.775	8.948	-	1.624	598.155	514.564
11	NOVEMBER	337.311	340.799	72.608	89.812	114.479	60.178	1.261	12.310	-	120	525.659	503.219
12	DESEMBER	265.813	399.434	148.680	45.234	159.409	36.007	1.080	7.687	-	29	574.982	488.391
JUMLAH		4.209.604	4.455.027	1.168.509	397.342	1.689.729	584.617	20.203	138.720	-	4.294	7.088.045	5.580.000

Sumber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Bongkar/Impor Barang adalah pembongkaran barang dari kapal, baik barang yang diangkut dari pelabuhan asal di Indonesia ataupun dari luar negeri.

Muat/Ekspor Barang adalah pemuatan barang ke kapal untuk diangkut ke pelabuhan tujuan di Indonesia atau ke luar negeri

Bongkar muat barang jenis peralatan bongkar muat yang digunakan di pelabuhan sangat tergantung kepada jenis barang yang akan dibongkar/muat.

Secara umum jenis barang dimaksud dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu: barang yang dikemas dengan petikemas, *general cargo* dan barang curah (kering/cair).

c. Data Arus Penumpang di Pelabuhan Makassar (Periode Januari s/d Desember Tahun 2016)

Tabel 4.

Data Arus Penumpang di Pelabuhan Makassar

NO.	BULAN	CALL	KEGIATAN		JUMLAH TURUN /NAIK DALAM JIWA	KETERANGAN
			PENUMPANG TURUN	PENUMPANG NAIK		
1	JANUARI	89	24.600	28.234	52.834	
2	FEBRUARI	82	17.390	17.251	34.641	
3	MARET	72	13.534	15.225	28.759	
4	APRIL	77	15.596	11.192	26.788	
5	MEI	80	22.407	17.869	40.276	
6	JUNI	106	29.920	39.256	69.176	
7	JULI	107	37.497	48.267	85.764	
8	AGUSTUS	86	30.337	26.850	57.187	
9	SEPTEMBER	92	28.559	20.360	48.919	
10	OKTOBER	94	24.147	20.941	45.088	
11	NOVEMBER	94	20.638	16.290	36.928	
12	DESEMBER	101	27.390	21.925	49.315	
JUMLAH		1080	292.015	283.660	575.675	

Sumber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Penumpang naik adalah penumpang yang naik ke kapal untuk berangkat ke pelabuhan tujuan.

Penumpang turun adalah penumpang yang turun dari kapal yang diangkut dari pelabuhan asal.

Petugas melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, melakukan pengamanan dan pelayanan terhadap penumpang naik/turun dari kapal dengan selamat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan fokus dari penelitian ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan anggaran pada kantor otoritas pelabuhan utama makassar, dimana peneliti ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.

Pada penelitian deskriptif kualitatif peneliti dituntut dapat memaparkan, menjelaskan, menggunakan dan menggali data berdasarkan yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh sumber data sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan melalui tehnik pengamatan dan wawancara.

1. Data Informan Peneliti

Berikut ini data informan dalam penelitian ini yang berjumlah 2 orang

Tabel 5.

Data Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Andarias Allopa, SE	Staf Pengelola Keuangan
2.	Eko Pratama, SE	Staf Pengelola Keuangan

Berdasarkan data tabel 5 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini memiliki 2 informan yang sama-sama bergerak pada bagian pengelola

keuangan. Dimana kantor pemerintahan termasuk didalamnya Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan pada kurung waktu bulan April sampai Mei 2017. Dimana informan yang melakukan wawancara adalah pegawai sub bagian keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

Adapaun latar belakang pendidikan informan keduanya lulusan Sarjana Ekonomi (SE) dan kini dalam tahap menyelesaikan pendidikan S2 (tesis) disalah satu universitas di Makassar.

Berbicara mengenai pengetahuan akuntansi dan sistem pengolahan keuangannya maupun anggarannya tidak usah diragukan lagi selain itu keduanya sudah bekerja dibidang akuntansi ini kurang lebih 13 tahun lamanya.

Berikut ini deskripsi wawancara dengan pegawai sub bagian keuangan :

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan mengenai Apakah manajemen sumber daya manusia sudah mengimplementasikan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ? diperoleh hasil yang

hampir serupa dari masing-masing informan, seperti kutipan wawancara yang dikutip dari informan bapak Andrias Allopa, SE yang menyatakan :

“iya sudah sesuai. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan kita berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)” (wawancara pada hari selasa, tanggal 25 juli 2017).

Kemudian peneliti lebih lanjut menggali informasi dengan pertanyaan Apakah di OP Makassar pegawai yang ditempatkan dibidang masing-masing sudah sesuai kompetensi atau SDM yang dimiliki? beliau pun menjawab sebagai berikut :

“iya, Kurang lebih belum sepenuhnya artinya hampir sudah dilaksanakan tapi kalau bukan beground dari kompetensi itu dia mungkin sudah punya basikal atau pengalaman. Contohnya di keuangan ada yang bukan jurusan akuntansi atau keuangan tapi sudah punya pengalaman” (wawancara pada hari selasa, tanggal 25 juli 2017).

b. Teknologi Informasi

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan pegawai sub bagian keuangan kantor ototritas pelabuhan utama Makassar tentang sejak kapan sub bagian keuangan memakai aplikasi RKA-KL untuk membuat laporan keuangan mengenai anggaran ? hasil wawancara dengan pegawai su bagian keuangan sebagai berikut :

“sudah ada sejak tahun 2009” (wawancara pada hari selasa, tanggal 25 juli 2017).

Lanjut peneliti menggali informasi mengenai Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah memiliki keterampilan dan keahlian dalam

mengoprasikan aplikasi RKA-KL pegawai sub bagian keuangan kembali menjawab sebagai berikut :

“Iya, Pegawai sub bagian keuangan sudah memiliki keterampilan dan keahlian khusus” (wawancara pada hari selasa, tanggal 25 juli 2017).

c. Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan pegawai sub bagian keuangan mengenai Apakah sistem pengendalian intern sudah berjalan efektif dikantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ? hasil wawancara dengan pegawai sub bagian keuangan sebagai berikut :

“Masih kebijakan dari pimpinan tapi kalau dari tim SPI sendiri belum ada” (wawancara pada hari selasa, tanggal 25 juli 2017).

Kemudian peneliti lebih lanjut menggali informasi tentang Apakah sub bagian keuangan memiliki kebijakan atau aturan-aturan intern secara tertulis dalam memberikan sanksi terhadap pegawai yang melakukan kecurangan dan ketidakjujuran yang ditetapkan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ? hasil wawancara dengan pegawai sub bagian keuangan sebagai berikut :

“iya, Jika ada yang melakukan kecurangan atau ketidakjujuran diberitahukan kepada bagian kepegawaian terus dilaporkan kepada pimpinan” (wawancara pada hari selasa, tanggal 25 juli 2017).

d. Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan mengenai Apakah dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA harus melakukan pelatihan khusus ? hasil wawancara dengan pegawai sub bagian keuangan sebagai berikut :

“iya, ada diklat pelatihan khususnya, diklat khusus di Makassar satu kali, kemudian diklat bendahara pengeluaran kurang lebih dua kali untuk secara resminya. Sebelum ikut pelatihan kita harus tahu materinya dulu kemudian penerapannya ke aplikasi. Artinya kita harus memahami apa itu SAIBA, apa-apa materi/teori di dalam SAIBA kita pelajari baru kemudian kita simulasi kedalam contoh dan terjun langsung ke aplikasinya. Pada saat proses pelatihan berlangsung kita akan diberikan contoh laporan sebutlah laporan yang dimaksud itu laporan realisasi SPM atau pendapatan (transaksi) baru kita input langsung ke aplikasinya. Instrukturnya langsung dari perbendaharaan kementerian keuangan karena aplikasi SAIBA dari kementerian keuangan jadi yang lebih tahu dari perbendaharaan” (wawancara pada hari selasa, tanggal 25 juli 2017).

Selanjutnya wawancara dilanjutkan tentang Apakah dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual menggunakan SAIBA pegawai sub bagian keuangan merasa terbantu ? hasil wawancara dengan pegawai sub bagian keuangan sebagai berikut :

“iya, harusnya terbantu karena penerapan basis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA artinya pelaporan memudahkan untuk membuat laporan keuangan. Bentuk kemudahan yang dimaksud adalah apabila kita ingin melihat laporan operasional kita bisa langsung melihatnya secara rinci bahkan jenis-jenis realisasinya LO nya berapa akan nampak secara mendetail. Apabila kita akan melihat realisasi pendapatan maka yang muncul realisasi pendapatan, realisasi pengeluaran tidak akan muncul” (wawancara pada hari selasa, tanggal 25 juli 2017).

e. Kualitas Informasi Keuangan

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan tentang Apakah Informasi Laporan Keuangan kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sudah disajikan secara integritas dan tepat waktu ? hasil wawancara dengan pegawai sub bagian keuangan sebagai berikut :

“iya, karena kualitas informasi keuangan atau laporan keuangan yang berkualitas itu harus menghasilkan data yang akuntabel artinya data itu sudah benar, dimana data yang sudah benar berarti terintegrasi untuk ketepatan waktu dituntut untuk tepat waktu dikarenakan secara pelaporan terjadwal. Telah ada jadwal untuk melakukan rekonsiliasi dengan perbendaharaan Negara lewat KPPN untuk kementerian keuangan selanjutnya pertanggungjawaban masing-masing ke kementerian perhubungan lewat eselon I dan itu telah dilakukan rekonsiliasi” (wawancara pada hari selasa, tanggal 25 juli 2017).

Selanjutnya wawancara dilanjutkan tentang Apakah informasi laporan keuangan yang dihasilkan kantor otoritas pelabuhan utama Makassar hasilnya tidak akan berbeda setelah dilakukan pengujian oleh pihak audit ? hasil wawancara dengan pegawai sub bagian keuangan sebagai berikut :

hasilnya tidak akan berbeda karena memang data yang diinput memang data yang benar” (wawancara pada hari selasa, tanggal 25 juli 2017).

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan anggaran pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar
 - a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya melalui bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang cukup memadai dibidang keuangan.

Berbicara tentang sumber daya manusia berarti berbicara tentang akuntansi sumber daya manusia, dimana pegawai sub bagian keuangan telah mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah dengan baik pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

Berdasarkan kutipan wawancara yang dilakukan dengan informan (Aa) sebagai berikut :

“Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar khususnya sub bagian keuangan telah mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik dan rata-rata dikeuangan telah memiliki dasar tentang akuntansi atau keuangan” (wawancara pada hari selasa, tanggal 25 juli 2017).

Masih mengenai sumber daya manusia, kutipan wawancara kembali dipaparkan oleh informan (Aa) sebagai berikut :

“Pegawai sub bagian keuangan secara keseluruhan dalam penyusunan maupun pelaporan keuangan telah disesuaikan dengan standar akuntansi, laporan keuangan yang disusun dipertanggungjawabkan ke kementrian keuangan lewat perbendaharaan negara (KPPN) dan kementrian perhubungan lewat eselon I jadi laporannya telah sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku” (wawancara pada hari selasa, tanggal 25 juli 2017).

Pegawai sub bagian keuangan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah memiliki dasar tentang akuntansi atau keuangan untuk

menyusun laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

b. Teknologi Informasi

Teknologi informasi *atau information technology* (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Dalam konteks bisnis, *Information Technology Association Of America* menjelaskan pengelolaan, penyimpanan dan penyebaran vokal, informasi bergambar, teks dan numerik oleh mikroelektronika berbasis kombinasi komputasi dan telekomunikasi.

TI melakukan berbagai fungsi (TI disiplin/kompetensi) dari menginstal aplikasi untuk merancang jaringan komputer dan *database*.

Berbicara tentang Teknologi Informasi dalam hal ini aplikasi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan mengenai anggaran adalah aplikasi RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran – Kementerian/Lembaga). Sejak disusunya RKA-KL tahun 2005 sesuai amanat Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, penyempurnaan sistem anggaran telah dilakukan penyempurnaan ini tetap berlandaskan pada konsep penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan

kerangka penganggaran jangka menengah. Penyempurnaan aplikasi RKA-KL ini dilakukan mengacu pada perubahan kebijakan dan perubahan teknis aplikasi. Pada perubahan ini informasi yang melekat pada RKA-KL lebih mempunyai bobot dan dari sisi teknis aplikasi memudahkan para operator dalam menuangkan data-data RKA-KL ke dalam aplikasi. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar khususnya sub bagian keuangan telah menggunakan aplikasi RKA-KL sejak tahun 2009. Selain itu pegawai sub bagian keuangan juga telah memiliki keterampilan dan keahlian untuk menjalankan aplikasi RKA-KL berbekal dari adanya diklat dan bimtek yang diadakan oleh perbendaharaan (kementerian).

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. DIPA disusun berdasarkan keputusan Presiden mengenai rincian belanja pemerintahan pusat. DIPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapatkan pengesahan menteri keuangan.

Kuasa pengguna DIPA (KPA) menyiapkan usulan revisi DIPA kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB). Dalam proses DIPA akun-akun atau kegiatan yang direvisi tidak bisa dijalankan, sedangkan yang tidak direvisi bisa berjalan seperti

biasanya, namun yang ingin direvisi belum bisa berjalan kecuali telah keluar surat persetujuan yang dilampiri notifikasi pengesahan revisi DIPA dari KANWIL DJPB.

c. Sistem Pengendalian Intern

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. SPI melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat, rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknologi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sejauh ini pengambilan keputusan atau wewenang langsung dari pimpinan. Jika ada yang melakukan kecurangan atau ketidakjujuran diberitahukan kepada bagian kepegawaian terus

dilaporkan pada pimpinan, kemudian tugas pimpinan adalah menindaklanjutinya.

d. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Sampai dengan tahun 2003 SAP menggunakan basis kas sedangkan dari tahun 2004-2014, SAP menggunakan basis kas menuju akrual. SAP berbasis akrual ini adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui asset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual sejak tahun 2015, Indonesia sudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual (*accrual basis*) dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Transaksi dicatat dengan menggunakan *accrual basis*
2. Asset diukur dengan menggunakan *historical cost*
3. Depresiasi untuk asset tetap
4. *Accrual basis* pada pendapatan dan beban
5. *Full disclosure*

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam hal ini yang menangani aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah mengikuti diklat atau bimtek, selain itu dengan

digunakannya aplikasi SAIBA pegawai sub bagian keuangan merasa terbantu karena pada aplikasi SAIBA penginputannya tidak dilakukan secara manual lagi dan dalam melakukan segala pekerjaan lebih mudah.

e. Kualitas Informasi Keuangan

Untuk mendapatkan informasi akuntansi berupa laporan keuangan diperlukan standar atau kriteria yang menjadi acuan pokok dalam membuat laporan keuangan yang dinilai berkualitas. Di Indonesia standar laporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK adalah himpunan prinsip, prosedur, metode, dan tehnik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan/kantor seperti kreditor.

Berdasarkan standar akuntansi keuangan, tujuan akuntansi dan laporan keuangan pada dasarnya untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha yang akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan ekonomi. Manfaat informasi keuangan terpenuhi jika memiliki kriteria atau standar. Berikut ini beberapa kriteria kualitas informasi keuangan :

1. Relevan

Kualitas informasi keuangan pada Dinas Perhubungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah memuat informasi yang

mempengaruhi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan telah memenuhi karakteristik :

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d) Lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar

kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Handal

Informasi dalam laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

- a) Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b) Dapat diverifikasi (*verifiability*), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c) Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam dalam laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara secara internal telah dilakukan Dinas Perhubungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dengan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal telah dilakukan Dinas Perhubungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dengan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Dinas Perhubungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Dinas Perhubungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar memiliki laporan keuangan yang berkualitas tentunya tidak lepas dari kinerja pegawai sub

bagian keuangan yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya berbekal dari pendidikan pelatihan dan pengalaman kerja yang cukup memadai dibidang keuangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan mengenai kualitas informasi keuangan diperoleh informasi bahwa kualitas informasi keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah disajikan secara integritas dan tepat waktu. Maka dari itu kualitas informasi laporan keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan dipercaya.

Adapun bentuk Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Perhubungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

Tabel 6

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 04 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
WILAYAH/PROPINSI : 1900 SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : 287469 KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. LRAST
Tanggal 15 Mei 2015
Halaman 1
Prog id lu_poslit

No	URAIAN	2017				2016			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA	442,623,460,000	12,510,334,906	(430,113,125,094)	2.83	109,857,142,000	22,203,659,857	(87,653,482,143)	20.21
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	442,623,460,000	12,510,334,906	(430,113,125,094)	2.83	109,857,142,000	22,203,659,857	(87,653,482,143)	20.21
A.1.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	442,623,460,000	12,510,334,906	(430,113,125,094)	2.83	109,857,142,000	22,203,659,857	(87,653,482,143)	20.21
B	BELANJA NEGARA								
B.1.1	Rupiah Murni	38,206,851,000	6,059,978,054	(32,146,872,946)	15.86	68,632,111,000	59,821,045,347	(9,011,065,653)	86.91
B.1.1.a	Belanja Pegawai	10,601,856,000	4,417,666,402	(6,183,989,598)	41.67	11,865,606,000	10,697,347,254	(1,168,258,746)	90.15
B.1.1.b	Belanja Barang	10,487,448,000	1,377,728,852	(9,109,719,148)	13.14	27,178,102,000	19,349,463,093	(7,829,638,907)	71.19
B.1.1.c	Belanja Modal	17,117,547,000	264,382,800	(16,853,164,200)	1.54	29,787,403,000	29,774,235,000	(13,168,000)	99.96
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	38,206,851,000	6,059,978,054	(32,146,872,946)	15.86	68,632,111,000	59,821,045,347	(9,011,065,653)	86.91
C	PEMBIAYAAN								
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 04 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
WILAYAH/PROPINSI : 1900 SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : 287469 KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lapor : LRA07
Tanggal : 25 Mei 2018
Monev : Z
Prog. B : 3, 3, 3, 3

No	URAIAN	2017				2016			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C. II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C. II.1	Penerikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C. II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Makassar, 31 Desember 2017

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Ir Rahmatullah, MSI
NIP. 196208031989031001

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pegawai sub bagian keuangan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah memiliki dasar tentang akuntansi atau keuangan untuk menyusun laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Teknologi informasi yang digunakan dalam hal ini untuk membuat dan menyusun rencana anggaran untuk tahun berikutnya suatu kementerian/lembaga pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar khususnya sub bagian keuangan adalah aplikasi RKA-KL dan aplikasi tersebut sudah digunakan sejak tahun 2009 hingga saat ini.

Sistem Pengendalian Intern pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sejauh ini pengambilan keputusan atau wewenang langsung dari pimpinan. Jika ada yang melakukan kecurangan atau ketidakjujuran diberitahukan kepada bagian kepegawaian terus dilaporkan pada pimpinan, kemudian tugas pimpinan adalah menindaklanjutinya. Dalam artian SPI pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sudah berjalan dengan baik.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan pada saat ini adalah standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan aplikasi yang digunakan adalah aplikasi SAIBA. Dengan digunakannya aplikasi

SAIBA pegawai sub bagian keuangan merasa terbantu dan dalam melakukan segala pekerjaan lebih mudah.

Kualitas informasi keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah disajikan secara terintegrasi dan tepat waktu.

Hal demikian mendukung pendapat dari Putu Upabayu Rama Mahaputra, dkk (2014), yang menyatakan bahwa :

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar.

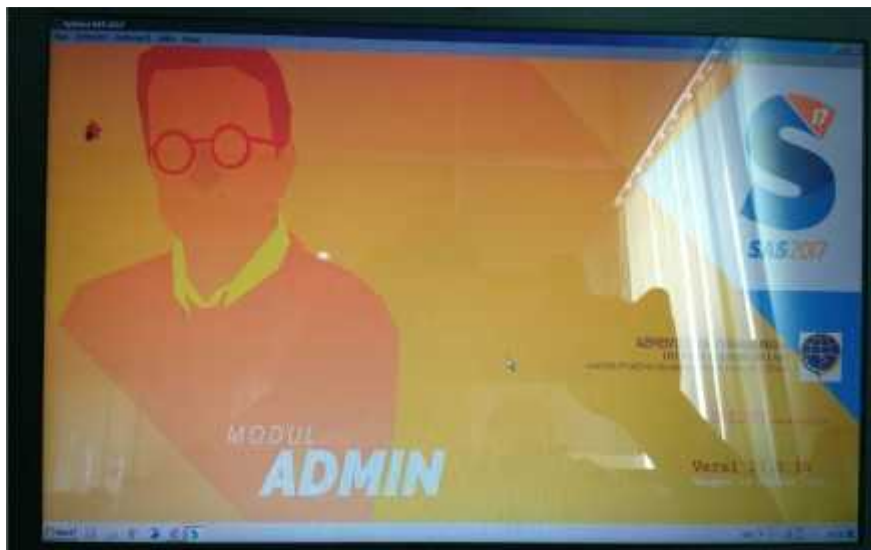
2. Aplikasi Dalam Membuat Laporan Anggaran Pemerintah

Berikut ini adalah beberapa tampilan mengenai aplikasi laporan anggaran pemerintah, sebagai berikut :

a. Sistem Aplikasi Satker (SAS)

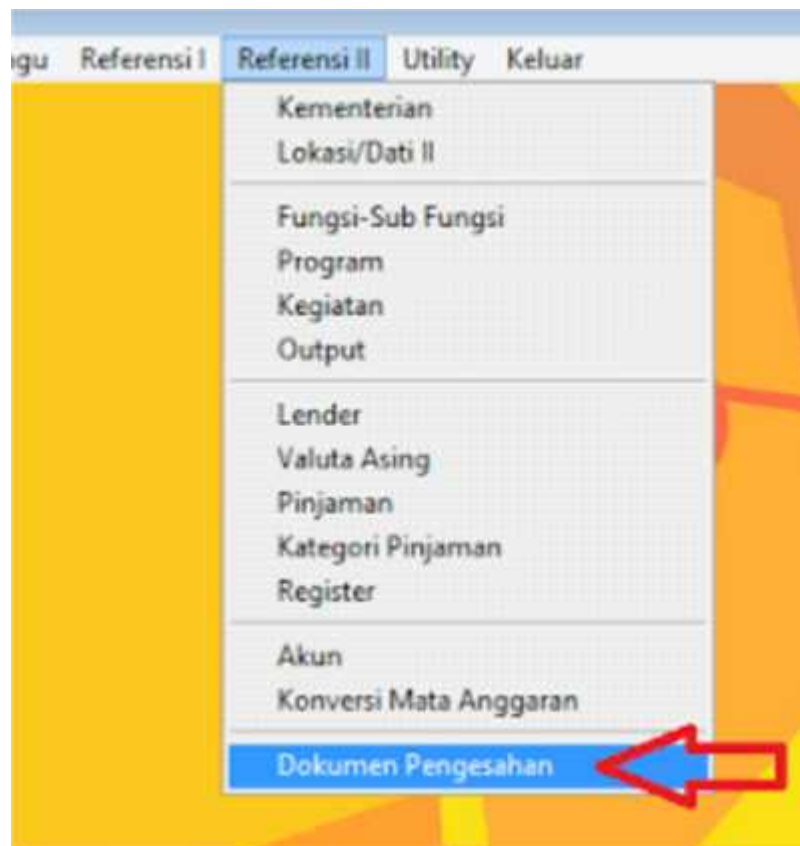
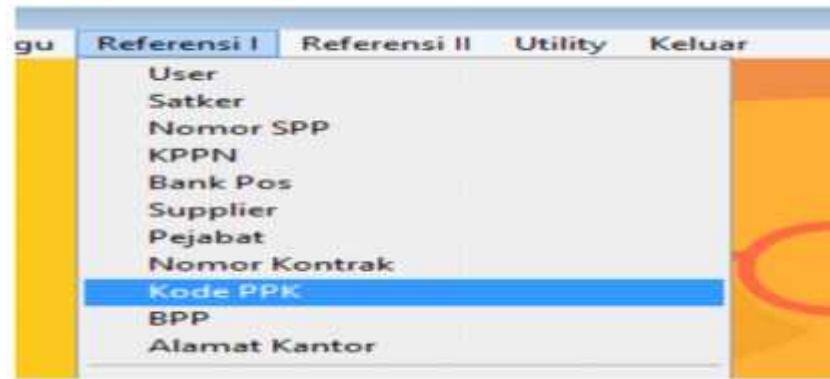
Gambar 3.

Tampilan Awal Pada Aplikasi SAS



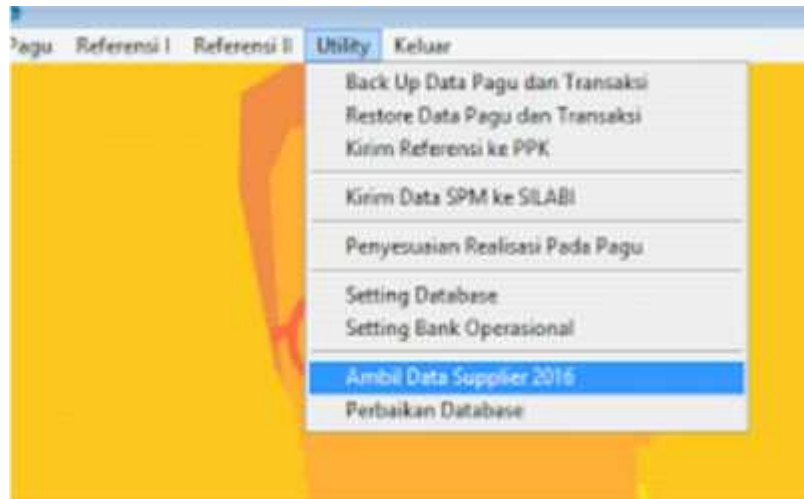
Gambar 4.

Tampilan Pada Menu Referensi



Gambar 5.

Tampilan Pada Menu Utility



b. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

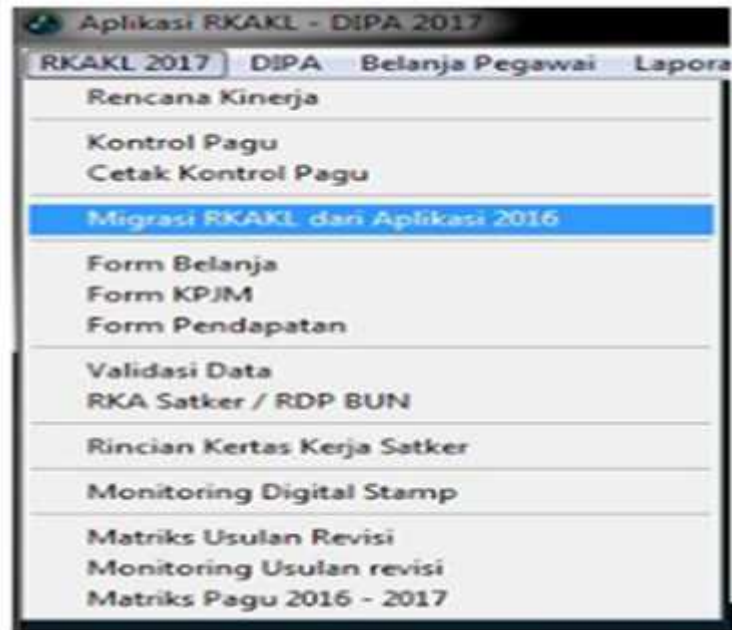
Gambar 6.

Tampilan Awal Pada Aplikasi (RKA-KL)



Gambar 7.

Tampilan Pada Menu RKA-KL 2017



c. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA)

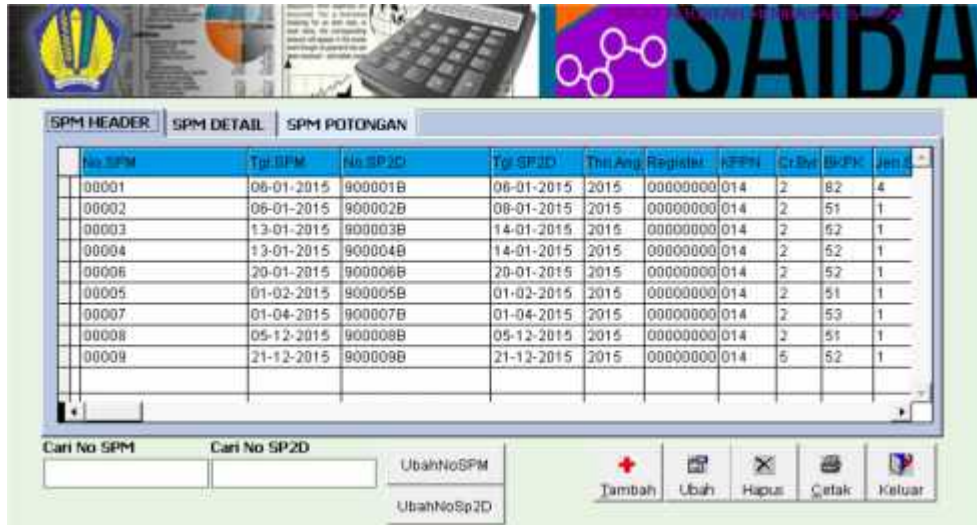
Gambar 8.

Tampilan Awal Pada Aplikasi SAIBA



Gambar 9.

Tampilan Daftar Surat Perintah Membayar (SPM)



No SPM	Tgl SPM	No SP2D	Tgl SP2D	Ths Ang	Register	KPPN	Cr Byr	B/PK	Jen
00001	06-01-2015	900001B	06-01-2015	2015	00000000	014	2	82	4
00002	06-01-2015	900002B	06-01-2015	2015	00000000	014	2	51	1
00003	13-01-2015	900003B	14-01-2015	2015	00000000	014	2	52	1
00004	13-01-2015	900004B	14-01-2015	2015	00000000	014	2	52	1
00006	20-01-2015	900006B	20-01-2015	2015	00000000	014	2	52	1
00005	01-02-2015	900005B	01-02-2015	2015	00000000	014	2	51	1
00007	01-04-2015	900007B	01-04-2015	2015	00000000	014	2	53	1
00008	05-12-2015	900008B	05-12-2015	2015	00000000	014	2	51	1
00009	21-12-2015	900009B	21-12-2015	2015	00000000	014	5	52	1

3. Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan anggaran pada kantor otoritas pelabuhan utama Makassar, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia, Pegawai sub bagian keuangan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah memiliki dasar tentang akuntansi atau keuangan untuk menyusun laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar khususnya sub bagian keuangan telah menggunakan aplikasi RKA-KL sejak tahun 2009.
3. Sistem Pengendalian Intern pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sejauh ini pengambilan keputusan atau wewenang langsung dari pimpinan. Jika ada yang melakukan kecurangan atau ketidakjujuran diberitahukan kepada bagian kepegawaian terus dilaporkan pada pimpinan, kemudian tugas pimpinan adalah menindaklanjutinya.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam hal ini yang menangani aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah mengikuti diklat atau bimtek, selain itu dengan digunakannya aplikasi

SAIBA pegawai sub bagian keuangan merasa terbantu karena pada aplikasi SAIBA penginputannya tidak dilakukan secara manual lagi dan dalam melakukan segala pekerjaan lebih mudah.

5. Kualitas informasi keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah disajikan secara terintegrasi dan tepat waktu.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka beberapa saran dari peneliti yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pimpinan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar khususnya sub bagian keuangan agar bisa meningkatkan kualitas informasi keuangan dengan sering memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan akuntansi atau keuangan sehingga dalam pembuatan laporan keuangan tersebut informasi yang disajikan lebih berkualitas dan akurat.
2. Selain itu untuk mengakses data dalam mengontrol kondisi keuangan perlu adanya ketersediaan sistem jaringan dan website tersendiri agar dapat terkoneksi langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti pengaruh kualitas SDM akuntansi terhadap kualitas informasi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Besse Heriani. 2016. *Analisis Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Kota Makassar*. Skripsi. Makassar : Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar
- Irfan, Ikhwanu, Haza. 2015. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Padang)*. Artikel. Hal 1-19.
- Kadandia. 2012. *Sistem Informasi Keuangan*. (online)
<http://kadandia.blogspot.co.id/2012/04/sistem-informasi-keuangan.html>
- KSAP. 2012. *Standar Akuntansi Pemerintahan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kumalase, Diyan, dkk. 2014. *Analisi Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Pada PT.PLN (Persero) Wilayah Jawa Tengah*. Jurnal. Hal. 1-15.
- Kurniawan, Anugrah. 2016. *Evaluasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa*. Skripsi Makassar : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Madjam, Anggraeni S, dkk. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Pada Dppkad Kabupaten Gorontalo Utara)*. Jurnal. Hal. 1-12.
- Mahsun, dkk. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Cetakan Kelima. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. Cetakan Kesatu. Bandung. PT Refika Aditama.

Simplenews05. 2014. *Kriteria Kualitas Informasi Keuangan*. (online)
simplenews05.blogspot.com

Tenardi, Wendri, dkk. 2009. *Sistem Informasi Keuangan Pada Sekolah ST.Agatha*.
Jurnal. Hal 1-9

Yudianta, Agus, Gede. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Dan
Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal. Hal 1-13

RIWAYAT HIDUP



Harmiati Tahi, lahir di Kaili pada tanggal 19 Maret 1995, penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara, buah kasih dari ayahanda Tahi dan ibunda Pati. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2001 di SDN 16 Kaili Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN SATAP KAILI dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun 2010, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Suli dan berhasil lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis diterima melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).

Lampiran-lampiran

Lampiran 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

No	Variabel	Dimensi/sub variabel	Indikator
1	Sumber Daya Manusia	- Pendidikan dan Pelatihan - Pengalaman Kerja	- Pendidikan Formal - Pelatihan - Peran dan Tanggungjawab
2	Teknologi Informasi	- DIPA	- Penggunaan Anggaran - Sebagai Alat Pengendali - Pelaporan
3	Sistem Pengendalian Intern	- Sistem dan Prosedur Akuntansi (SOP) - Form, Dokumen dan Catatan Transaksi - Job Discription dan Job Spesification	- Penilaian Resiko - Lingkungan Pengendalian - Aktivitas Pengendalian Berkelanjutan

4	Standar Akuntansi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - SAIBA 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah - PSAP Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan - PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran - PSAP Nomor 03 Tentang Laporan Arus Kas
5	Kualitas Informasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Relevan - Dapat Diuji - Dapat Dimengerti - Netral - Tepat Waktu - Dapat Dibandingkan - Lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Manfaat Dari Laporan Keuangan Yang Dihasilkan - Kelengkapan Informasi Yang Disajikan - Penyajian Secara Jujur dan Dapat Diverifikasi - Keakuratan Dan

			<p>Ketelitian Data</p> <p>Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Sesuai Standard dan Dapat Dipahami- Dapat Dibandingkan Dengan Periode Sebelumnya
--	--	--	--

Lampiran 2

Checklist Observasi

Variabel Independen

Petunjuk : Beri tanda cheklist () pada kolom yang telah disediakan terhadap hasil pengamatan sesuai dengan option jawaban :

A. Sumber Daya Manusia

No	Sumber Daya Manusia	Implementasi	Implementasi
		Baik	Kurang Baik
1	Sejauh mana implementasi sumber daya manusia di sub bagian keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?		
2	Sejauh mana sumber daya manusia mengimplementasikan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di sub bagian keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?		

B. Teknologi Informasi

	Teknologi Informasi	Implementasi	Imlementasi
		Baik	Kurang Baik
1	Apakah selama proses revisi DIPA kegiatan tetap bisa berjalan atau tidak ? atau yang direvisi saja yang tidak boleh berjalan ?		
2	Sejauh mana pegawai sub bagian keuangan dapat mengoprasikan aplikasi RKA-KL DIPA POK ?		

C. Sistem Pengendalian Intern

	Sistem Pengendalian Intern	Implementasi	Implementasi
		Baik	Kurang Baik
1	Apakah sistem pengendalian intern di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sudah berjalan efektif ?		
2	Apakah ada kebijakan atau aturan-aturan intern secara tertulis yang memberikan sanksi terhadap pegawai yang melakukan kecurangan atau ketidakjujuran yang ditetapkan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?		

D. Standar Akuntansi Pemerintahan

	Standar Akuntansi Pemerintahan	Implementasi	Implementasi
		Baik	Kurang Baik
1	Apakah pegawai sub bagian keuangan telah melakukan pelatihan khusus dalam pengoprasian aplikasi SAIBA ?		
2	Apakah sub bagian keuangan merasa terbantu dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA ?		

Variabel Devenden

Petunjuk : beri tanda checklist () pada kolom yang telah disediakan terhadap hasil pengamatan sesuai dengan option jawaban :

E. Kualitas Informasi Keuangan

	Kualitas Informasi Keuangan	Implementasi	Implementasi
		Baik	Kurang Baik
1	Apakah informasi laporan keuangan yang dihasilkan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar menyajikan integritas data dan dihasilkan dengan tepat		

	waktu ?		
2	Apakah informasi laporan keuangan yang dihasilkan kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar hasilnya akan berbeda setelah dilakukan pengujian oleh pihak audit ?		

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

Pertanyaan Wawancara :

A. Sumber Daya Manusia

1. Apakah manajemen sumber daya manusia sudah mengimplementasikan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?

Jawaban.....

2. Apakah di OP makassar pegawai yang ditempatkan dibidang masing-masing sudah sesuai kompetensi atau SDM yang dimiliki ?

Jawaban.....

B. Teknologi Informasi

1. Sejak kapan sub bagian keuangan memakai aplikasi RKA-KL untuk membuat laporan keuangan mengenai anggaran ?

Jawaban.....

2. Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah memiliki keterampilan dan keahlian dalam mengoperasikan aplikasi RKA-KL ?

Jawab.....

C. Sistem Pengendalian Intern

1. Apakah sistem pengendalian intern sudah berjalan efektif dikantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?

Jawaban.....

2. Apakah sub bagian keuangan memiliki kebijakan atau aturan-aturan intern secara tertulis dalam memberikan sanksi terhadap pegawai yang melakukan

kecurangan dan ketidakjujuran yang ditetapkan oleh kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?

Jawaban.....

D. Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Apakah dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA harus melakukan pelatihan khusus ?

Jawaban.....

2. Apakah dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual menggunakan SAIBA pegawai sub bagian keuangan merasa terbantu ?

Jawaban.....

E. Kualitas Informasi Keuangan

1. Apakah informasi laporan keuangan kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sudah disajikan secara integritas dan tepat waktu ?

Jawaban.....

2. Apakah informasi laporan keuangan yang dihasilkan kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar hasilnya akan berbeda setelah dilakukan pengujian oleh pihak audit ?

Jawaban.....

Lampiran 4

Checklist Hasil Observasi

Variabel Independen

Petunjuk : Beri tanda cheklist () pada kolom yang telah disediakan terhadap hasil pengamatan sesuai dengan option jawaban :

A. Sumber Daya Manusia

No	Sumber Daya Manusia	Implementasi	Implementasi
		Baik	Kurang Baik
1	Sejauh mana implementasi sumber daya manusia di sub bagian keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?		
2	Sejauh mana sumber daya manusia mengimplementasikan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di sub bagian keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?		

B. Teknologi Informasi

	Teknologi Informasi	Implementasi	Imlementasi
		Baik	Kurang Baik
1	Apakah selama proses revisi DIPA kegiatan tetap bisa berjalan atau tidak ? atau yang direvisi saja yang tidak boleh berjalan ?		
2	Sejauh mana pegawai sub bagian keuangan dapat mengoprasikan aplikasi RKA-KL DIPA POK ?		

C. Sistem Pengendalian Intern

	Sistem Pengendalian Intern	Implementasi	Implementasi
		Baik	Kurang Baik
1	Apakah sistem pengendalian intern di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sudah berjalan efektif ?		
2	Apakah ada kebijakan atau aturan-aturan intern secara tertulis yang memberikan sanksi terhadap pegawai yang melakukan kecurangan atau ketidakjujuran yang ditetapkan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?		

D. Standar Akuntansi Pemerintahan

	Standar Akuntansi Pemerintahan	Implementasi	Implementasi
		Baik	Kurang Baik
1	Apakah pegawai sub bagian keuangan telah melakukan pelatihan khusus dalam pengoprasian aplikasi SAIBA ?		
2	Apakah sub bagian keuangan merasa terbantu dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA ?		

Variabel Devenden

Petunjuk : beri tanda checklist () pada kolom yang telah disediakan terhadap hasil pengamatan sesuai dengan option jawaban :

E. Kualitas Informasi Keuangan

	Kualitas Informasi Keuangan	Implementasi	Implementasi
		Baik	Kurang Baik
1	Apakah informasi laporan keuangan yang dihasilkan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar menyajikan integritas data dan dihasilkan dengan tepat		

	waktu ?		
2	Apakah informasi laporan keuangan yang dihasilkan kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar hasilnya akan berbeda setelah dilakukan pengujian oleh pihak audit ?		

Lampiran 5

Transkrip Wawancara

<p>Transkrip Wawancara antara Peneliti (Ht) dengan Informan (Aa) Hari Selasa Tanggal 25 juli 2017</p>
A. Sumber Daya Manusia
Ht : <i>Selamat siang pak maaf mengganggu waktunya sebentar ?</i>
Aa : <i>Siang, iya ada apa yah ?</i>
Ht : <i>Saya Harmiati Tahi mahasiswa unismuh yang sedang melakukan penelitian disini membutuhkan informasi dari bapak terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan anggaran pada kantor ini pak?</i>
Aa : <i>oh iya, informasi yang seperti apa ya ?</i>
Ht : <i>Begini pak, Apakah manajemen sumber daya manusia sudah mengimplementasikan akuntansi sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?</i>
Aa : <i>Iya sudah sesuai, dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan kita berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</i>
Ht : <i>Terus pak, Apakah di OP Makassar pegawai yang ditempatkan dibidang masing-masing sudah sesuai kompetensi atau SDM yang dimiliki ?</i>
Aa : <i>iya, Kurang lebih belum sepenuhnya artinya hampir sudah dilaksanakan tapi kalau bukan beground dari kompetensi itu dia mungkin sudah punya basikal atau pengalaman. Contohnya dikeuangan ada yang bukan jurusan akuntansi atau keuangan tapi sudah punya pengalaman.</i>
Ht : <i>Sejauh mana implementasi sumber daya manusia di sub bagian keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?</i>

<p>Aa : Sudah memenuhi standar karena rata-rata dikeuangan punya basically tentang akuntansi atau keuangan walaupun yang bukan dari basic keuangan karena sudah punya pengalaman jadi secara keseluruhan baik.</p>
<p>Ht : <i>Sejauh mana sumber daya manusia mengimplementasikan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di sub bagian keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?</i></p>
<p>Aa : secara keseluruhan pelaporan atau penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi karena pelaporan keuangan yang kita susun kita pertanggungjawabkan ke kementerian keuangan lewat perbendaharaan Negara KPPN dan kementerian perhubungan lewat eselon I jadi laporannya sudah sesuai dengan standar karena sudah ada pedoman.</p>

<p>B. Teknologi Informasi</p>
<p>Ht : <i>sejak kapan sub bagian keuangan memakai aplikasi RKA-KL untuk membuat laporan keuangan mengenai anggaran ?</i></p>
<p>Aa : sudah ada sejak tahun 2009.</p>
<p>Ht : <i>Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah memiliki keterampilan dan keahlian dalam mengoperasikan aplikasi RKA-KL ?</i></p>
<p>Aa : Iya, Pegawai sub bagian keuangan sudah memiliki keterampilan dan keahlian khusus.</p>
<p>Ht : <i>Apakah selama proses revisi DIPA kegiatan tetap bisa berjalan atau tidak ? atau yang direvisi saja yang tidak boleh berjalan ?</i></p>
<p>Aa : dalam proses DIPA yang akun-akun atau kegiatan yang direvisi tidak bisa dilaksanakan, kalau yang tidak direvisi tetap bisa berjalan seperti biasanya cuman yang mau direvisi yang belum bisa berjalan kecuali sudah keluar pengesahan revisi baru bisa dilaksanakan.</p>

<p>Ht : <i>Sejauh mana pegawai sub bagian keuangan dapat mengoprasikan aplikasi RKA-KL DIPA POK ?</i></p>
<p>Aa : pegawai yang menangani aplikasi RKA-KL DIPA POK dia sudah bisa karena dia memiliki pengalaman dalam melakukan pelaporan anggaran lewat RKA-KL karena ini sudah ditangani dengan orang yang punya kompeten dalam menyusun anggaran yang diaplikasikan atau diinput dalam RKA-KL yang nantinya keluar DIPA POK.</p>
<p>C. Sistem Pengendalian Intern</p>
<p>Ht : <i>Apakah sistem pengendalian intern sudah berjalan efektif dikantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?</i></p>
<p>Aa : Masih kebijakan dari pimpinan tapi kalau dari tim SPI sendiri belum ada.</p>
<p>Ht : <i>Apakah sub bagian keuangan memiliki kebijakan atau aturan-aturan intern secara tertulis dalam memberikan sanksi terhadap pegawai yang melakukan kecurangan dan ketidakjujuran yang ditetapkan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?</i></p>
<p>Aa : iya, Jika ada yang melakukan kecurangan atau ketidakjujuran diberitahukan kepada bagian kepegawaian terus dilaporkan kepada pimpinan.</p>
<p>Ht : <i>Apakah sistem pengendalian intern di Kantor Otoritas Plabuhan Utama Makassar Sudah berjalan efektif ?</i></p>
<p>Aa : sejauh yang saya pahami SPI kalau kita pemerintahan SPI belum ada karena keputusan atau wewenang langsung dari pimpinan.</p>
<p>Ht : <i>Apakah ada kebijakan atau aturan-aturan intern secara tertulis yang memberikan sanksi terhadap pegawai yang melakukan kecurangan atau ketidakjujuran yang ditetapkan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?</i></p>
<p>Aa : kalau ada pegawai yang melakukan kecurangan atau ketidakjujuran dalam melaksanakan tugas pimpinan yang harus menindaklanjuti.</p>

D. Standar Akuntansi Pemerintahan
Ht : <i>Apakah dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA harus melakukan pelatihan khusus ?</i>
Aa : iya, ada diklat pelatihan khususnya, diklat khusus di Makassar satu kali, kemudian diklat bendahara pengeluaran kurang lebih dua kali untuk secara resminya. Sebelum ikut pelatihan kita harus tahu materinya dulu kemudian penerapannya ke aplikasi. Artinya kita harus memahami apa itu SAIBA, apa-apa materi/teori di dalam SAIBA kita pelajari baru kemudian kita simulasi kedalam contoh dan terjun langsung ke aplikasinya. Pada saat proses pelatihan berlangsung kita akan diberikan contoh laporan sebutlah laporan yang dimaksud itu laporan realisasi SPM atau pendapatan (transaksi) baru kita input langsung ke aplikasinya. Instrukturnya langsung dari perbendaharaan kementerian keuangan karena aplikasi SAIBA dari kementerian keuangan jadi yang lebih tahu dari perbendaharaan.
Ht : <i>Apakah dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual menggunakan SAIBA pegawai sub bagian keuangan merasa terbantu ?</i>
Aa : iya, harusnya terbantu karena penerapan basis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA artinya pelaporan memudahkan untuk membuat laporan keuangan. Bentuk kemudahan yang dimaksud adalah apabila kita ingin melihat laporan operasional kita bisa langsung melihatnya secara rinci bahkan jenis-jenis realisasinya LO nya berapa akan nampak secara mendetail. Apabila kita akan melihat realisasi pendapatan maka yang muncul realisasi pendapatan, realisasi pengeluaran tidak akan muncul.
Ht : <i>Apakah pegawai sub bagian keuangan telah melakukan pelatihan khusus dalam pengoprasian aplikasi SAIBA ?</i>
Aa : khusus yang tangani aplikasi SAIBA setidaknya dia harus mengikuti diklat atau Bintek secara intinya harus mengikuti pelatihan.
Ht : <i>Apakah sub bagian keuangan merasa terbantu dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA ?</i>
Aa : iya terbantu, karena sudah tidak melakukan secara manual lagi dan dalam melakukan segala pekerjaan akan lebih mudah dan banyak data transaksi tidak perlu diinput manual lagi kita tinggal mengambil data dari aplikasi

SAS yang isinya untuk SPM (Surat Perintah Membayar) dengan no SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari perbendaharaan lewat aplikasi SPAN transaksi itu yang bisa kita olah di SAIBA dan sudah masuk datanya tinggal kita cocokkan saat rekonsiliasi KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)

E. Kualitas Informasi Keuangan

Ht : *Apakah Informasi Laporan Keuangan kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sudah disajikan secara integritas dan tepat waktu ?*

Aa : iya, harusnya kan kalau laporan keuangan itu harus menghasilkan data yang akuntabel artinya data itu sudah benar berarti kan kalau data sudah benar artinya integritas untuk ketepatan waktu memang kita harus tepat waktu karena secara pelaporan sudah ada jadwalnya, sudah ada jadwal untuk melakukan rekonsiliasi dengan perbendaharaan Negara lewat KPPN untuk kementerian keuangan terus pertanggungjawaban kita ke kementerian perhubungan lewat eselon I nah.. itu sudah dilakukan rekonsiliasi.

Ht : *Apakah informasi laporan keuangan yang dihasilkan kantor otoritas pelabuhan utama Makassar hasilnya tidak akan berbeda setelah dilakukan pengujian oleh pihak audit ?*

Aa : Hasilnya tidak akan berbeda karena memang data yang diinput memang data yang benar.

Transkrip Wawancara Antara Peneliti (Ht) Dengan Informan (Ep) Hari Selasa Tanggal 25 Juli 2017	
A. Sumber Daya Manusia	
Ht :	<i>Assalamualaikum pak maaf mengganggu waktunya, saya Harmiati Tahi mahasiswa unismuh yang sedang melakukan penelitian di sini terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan anggaran pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.</i>
Ep :	Iya. Ada yang bisa saya bantu ?
Ht :	<i>Begini pak. Ini terkait apakah manajemen sumber daya manusia sudah mengimplementasikan akuntansi sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?</i>
Ep :	iya sudah, sudah diimplementasikan
Ht :	<i>Apakah di OP Makassar pegawai yang ditempatkan dibidang masing-masing sudah sesuai kompetensi atau SDM yang dimiliki ?</i>
Ep :	iya, Kurang lebih belum sepenuhnya artinya hampir sudah dilaksanakan tapi kalau bukan background dari kompetensi itu dia mungkin sudah punya basikal atau pengalaman. Contohnya dikeuangan ada yang bukan jurusan akuntansi atau keuangan tapi sudah punya pengalaman.
B. Teknologi Informasi	
Ht :	<i>sejak kapan sub bagian keuangan memakai aplikasi RKA-KL untuk membuat laporan keuangan mengenai anggaran ?</i>
Ep :	sejak tahun 2009 kita sudah mulai menggunakan aplikasi RKA-KL untuk membuat laporan keuangan rencana keuangan anggaran.

Ht : <i>Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah memiliki keterampilan dan keahlian dalam mengoprasikan aplikasi RKA-KL ?</i>
Ep : iya sudah, sebab pegawai yang memiliki tupoksi tersebut telah diberikan bimtek/diklat sehingga dapat mengoprasikan aplikasi RKA-KL tersebut.
C. Sistem Pengendalian Intern
Ht : <i>Apakah sistem pengendalian intern sudah berjalan efektif dikantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?</i>
Ep : masih kebijakan dari pimpinan.
Ht : <i>Apakah sub bagian keuangan memiliki kebijakan atau aturan-aturan intern secara tertulis dalam memberikan sanksi terhadap pegawai yang melakukan kecurangan dan ketidakjujuran yang ditetapkan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?</i>
Ep : klaw aturan secara intern tidak ada yahh,, tapi kalau aturan yang sudah dibuat oleh kementerian yang mengikat seluruh pegawai.
D. Standar Akuntansi Pemerintahan
Ht : <i>Apakah dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA harus melakukan pelatihan khusus ?</i>
Ep : iya, harus mengikuti diklat
Ht : <i>Apakah dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual menggunakan SAIBA pegawai sub bagian keuangan merasa terbantu ?</i>
Ep : Iya, terbantu sebab dengan menggunakan aplikasi tersebut kita tidak harus melakukan perhitungan secara manual tapi bisa dibantu dengan aplikasi SAIBA sehingga laporan yang tadinya bisa lama dibuat bisa dipercepat.
E. Kualitas Informasi Keuangan
Ht : <i>Apakah Informasi Laporan Keuangan kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sudah disajikan secara integritas dan tepat waktu ?</i>

Ep : iya sudah

Ht : *Apakah informasi laporan keuangan yang dihasilkan kantor otoritas pelabuhan utama Makassar hasilnya tidak akan berbeda setelah dilakukan pengujian oleh pihak audit ?*

Ep : hasilnya tidak akan berbeda karena memang data yang diinput memang data yang benar,

Lampiran 6

Foto Dokumentasi

Foto wawancara



Foto dengan informan Andre Allopa (AA) mengenai yakni Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Keuangan Dalam Penggunaan Anggaran Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar



Foto dengan informan Eko Pratama (EP) mengenai variabel penelitian yakni Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Keuangan Dalam Penggunaan Anggaran Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Foto observasi



